

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam membantu siswa mempersiapkan kehidupan di masa depan, khususnya pada siswa menengah atas yang berada pada fase remaja sebagai masa transisi menuju dewasa. Erikson (1968) menyatakan fase remaja berada pada tahap *identity versus role confusion*, yaitu fase ketika individu berusaha memahami identitas diri, peran sosial, dan arah masa depannya. Dalam proses tersebut, remaja mulai mengeksplorasi berbagai pilihan, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari pembentukan identitas diri.

Pada umumnya, siswa menengah atas mulai mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan tinggi sebagai langkah awal memasuki dunia kerja, karena pendidikan di perguruan tinggi dianggap dapat meningkatkan peluang mereka di pasar kerja (Ahmad dkk., 2024). Hal ini sejalan dengan teori *human capital* (Becker, 1964; Schultz, 1961), yang menjelaskan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang, semakin besar pula keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya. Namun, realitasnya dalam kondisi nyata di lapangan, di mana masih

banyak siswa yang justru tidak melanjutkan pendidikan maupun kesulitan memasuki dunia kerja setelah lulus.

Urgensi persiapan masa depan tersebut tercermin dari kondisi yang terjadi di lapangan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang mencatat sekitar 11.000 anak lulus sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, sebagai bagian dari total 42.415 anak yang termasuk kategori tidak sekolah pada awal tahun ajaran 2026 (Disdikpora Pandeglang, 2026). Kondisi ini berbarengan dengan angka ketenagakerjaan di wilayah tersebut, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pandeglang tercatat sebesar 8,09% pada tahun 2024, menjadikan kabupaten ini salah satu daerah dengan TPT tertinggi di Provinsi Banten (BPS Kabupaten Pandeglang, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pandeglang turut mencatat bahwa pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) oleh lulusan sekolah menengah dapat mencapai sekitar 1.000 orang per bulan, sementara ketersediaan lapangan kerja formal di wilayah tersebut masih terbatas (Disnakertrans Kabupaten Pandeglang, 2024).

Pola yang relatif serupa juga terlihat pada skala nasional. Badan Pusat Statistik (2026) melaporkan bahwa lulusan SMA/Sederajat menyumbang proporsi terbesar terhadap total pengangguran nasional, yaitu sekitar 28%, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka pada jenjang tersebut mencapai 6,23%. Selain itu, tercatat pula sekitar 3,57 juta lulusan SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (Mashabi & Prastiwi, 2024). Data-data tersebut memberikan indikasi bahwa transisi

dari jenjang menengah atas menuju pendidikan tinggi maupun dunia kerja masih menjadi tantangan yang banyak terjadi. Tingginya angka tersebut menegaskan pentingnya peran sekolah dalam membantu siswa mempersiapkan masa depan pendidikan maupun kariernya secara terarah, sebelum mereka lulus dan dihadapkan langsung pada kondisi nyata.

Tugas perkembangan siswa dalam merencanakan masa depan seharusnya bisa dibantu dengan adanya sistem pendukung (*support system*) yang memadai di lingkungan sekolah. Idealnya, sekolah memfasilitasi kematangan karier siswa melalui layanan bimbingan karier yang terstruktur, konsultasi bersama guru BK, maupun penyediaan mata pelajaran khusus bimbingan karier (Thasfa & Daulay, 2024). Namun pada kenyataannya, pelaksanaan bimbingan karier di institusi pendidikan sering kali masih bersifat sporadis atau insidental dan tidak terintegrasi ke dalam kurikulum (Ratna dkk., 2026).

Kondisi ini dapat dilihat secara nyata pada sekolah di pedesaan, dengan adanya keterbatasan infrastruktur teknologi dan ketiadaan instrumen asesmen minat-bakat terstandarisasi yang menjadi kendala utama bagi guru BK. Penelitian Salim dkk. (2024) menyoroti keterbatasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan karier di sekolah pedesaan akibat kurangnya tenaga profesional. Dibuktikan dengan adanya realita lapangan di mana satu orang guru BK harus menangani hingga 1.175 siswa secara mandiri, sehingga tenaga pengajar lebih sering dialihkan fungsinya sekadar untuk mengatasi siswa yang bermasalah secara disiplin saja. Kondisi ini jauh menyimpang

dari standar rasio ideal guru BK yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, yaitu satu guru BK untuk 150-160 siswa.

Kondisi tersebut serupa dengan temuan dalam penelitian Alfiani dan Hajar (2024) pada salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Pandeglang. Penelitian tersebut menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia, di mana layanan BK karier menjadi tidak optimal, sejalan dengan itu ditemukan pula minimnya minat awal para siswa untuk melanjutkan studi akibat keterbatasan finansial keluarga yang terbatas untuk membiayai kuliah, membuat siswa semakin rentan mengalami kebingungan dalam menentukan arah masa depan pendidikan maupun kariernya, tanpa adanya sistem pendukung eksternal yang memadai untuk membantu mereka mengambil keputusan.

Berdasarkan berbagai keterbatasan diatas, muncul dampak nyata pada siswa, yaitu berupa kebingungan dalam menentukan pilihan karier maupun program studi lanjutan setelah lulus sekolah (Mahara, 2020). Penelitian Merdiasih dan Kasandra (2023) menyatakan bahwa siswa SMA masih banyak yang belum menentukan keputusan karier yang akan dipilih setelah lulus. Sejalan dengan penelitian Saputra, Adityawarman dan Nursyabani (2024), siswa yang belum memiliki kejelasan mengenai pilihan karier di masa depan terjadi akibat sejumlah faktor; kebingungan menentukan jurusan yang sesuai minat dan bakat, perbedaan antara pilihan karier yang diinginkan dengan harapan keluarga, hambatan ekonomi, kurangnya informasi mengenai karier yang diminati, serta minimnya pengetahuan dan keterampilan

merencanakan masa depan yang seharusnya diperoleh siswa dari lingkungan keluarga maupun sekolah.

Berbagai permasalahan di atas, mulai dari tingginya angka lulus tidak melanjutkan studi dan pengangguran lulusan sekolah menengah sebagaimana telah diuraikan, keterbatasan layanan bimbingan karier di wilayah pedesaan, rendahnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan, hingga kebingungan dalam menentukan tujuan pascalulus, diduga turut berkontribusi terhadap rendahnya orientasi masa depan siswa. Padahal, orientasi masa depan merupakan aspek penting yang membantu siswa dalam memandang, merencanakan, serta menetapkan tujuan pendidikan dan karier yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, absennya bimbingan karier yang memadai di sekolah pedesaan membuat siswa berpotensi kehilangan arah dalam membangun motivasi, menyusun rencana tindakan (*planning*), serta mengevaluasi pilihan mereka (Nurmi, 1991). Jika orientasi masa depan pada domain pendidikan dan karier ini tidak dibentuk dengan matang pada jenjang ini, siswa akan kesulitan mengambil keputusan secara tepat dan tidak siap menghadapi dunia kerja maupun perkuliahan setelah lulus (Sari & Astuti, 2014).

Orientasi masa depan pada remaja ditandai oleh berbagai tuntutan, tantangan, dan peluang yang memengaruhi cara berpikir serta perilaku terhadap masa depan (Nurmi, 1991). Pada tahap ini, individu mulai membentuk tujuan sesuai dengan tahap perkembangannya serta menyusun tujuan pribadi berdasarkan pengalaman dan kondisi yang sedang dihadapi. Orientasi masa depan juga dipahami sebagai konstruk psikologis yang mencakup aspek kognitif, motivasional, dan emosional yang berkaitan dengan

harapan, rencana, aspirasi, dan kekhawatiran terhadap masa depan, khususnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan diri (Bozzato, 2024).

Perkembangan orientasi masa depan individu dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nurmi (1991) menjelaskan bahwa orientasi masa depan dipengaruhi oleh dua domain, yaitu faktor konteks sosial (*context-related factors*) seperti dukungan sosial dan efektivitas layanan bimbingan karier di sekolah, serta faktor individu (*person-related factors*) seperti *self-efficacy*, *self-esteem*, dan kemampuan regulasi diri (*self-regulation*).

Berbagai temuan menunjukkan ketika faktor konteks sosial berupa kurangnya dukungan atau layanan bimbingan karier di sekolah sedang tidak optimal, keberhasilan siswa dalam membangun orientasi masa depan akan sangat bergantung pada kekuatan faktor individu tersebut. Di antara faktor internal yang ada, Miller dan Brown (1991) menekankan pentingnya regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengontrol perilakunya secara mandiri demi mencapai tujuan. Lebih lanjut, kemampuan ini berperan sebagai kapasitas internal yang membantu siswa tetap aktif mencari informasi, mengendalikan emosi, serta menyusun perencanaan pendidikan dan karier secara realistis di tengah keterbatasan yang ada (Lauren dkk., 2020; Zimmerman, 2000). Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada regulasi diri karena variabel ini langsung mengarah pada tindakan nyata, karena untuk membangun orientasi masa depan, individu tidak sekadar membutuhkan keyakinan atau rasa percaya diri, melainkan tindakan konkret yang melibatkan perencanaan matang dan kontrol perilaku yang konsisten.

Dalam konteks akademis sehari-hari, regulasi diri membantu siswa mengatur proses belajarnya, seperti menetapkan tujuan, mengelola waktu, serta mengontrol perhatian dan motivasi selama pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mampu mengatur dirinya dengan baik cenderung memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan siswa dengan regulasi diri yang rendah (Gür & Yaban, 2025). Kondisi tersebut terjadi karena regulasi diri mendukung keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan belajar serta menjaga mereka tetap fokus pada tujuan jangka panjang yang ingin dicapai (Herndon & Bembenutty, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rodríguez-Ardura dan Meseguer-Artola (2019) membuktikan, siswa dengan kemampuan regulasi diri yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tekanan serta tantangan belajar, sekaligus menunjukkan respons yang lebih adaptif ketika mengalami kesulitan. Kemampuan ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan mental yang lebih baik serta mampu menurunkan kecenderungan perilaku berisiko negatif pada remaja (Jessor, 1992).

Fenomena keterbatasan sistem pendukung karier di daerah pedesaan tergambar secara nyata di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Berdasarkan data indeks desa dari Kominfo Banten (2026), Kabupaten memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh wilayah pedesaan. Kondisi geografis dan persebaran wilayah tersebut berdampak langsung pada belum meratanya sarana teknologi informasi dan infrastruktur penunjang pendidikan (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026).

Karakteristik wilayah tersebut menjadikan penelitian di Kabupaten Pandeglang menarik, karena dinamika kesenjangan akses yang nyata. Di daerah perkotaan, ketika layanan BK di sekolah tidak optimal, siswa memiliki alternatif yang luas untuk mencari informasi karier melalui jaringan internet mandiri yang stabil serta lembaga bimbingan belajar non-formal yang tersebar luas untuk membantu mengembangkan minat dan bakat mereka. Sebaliknya, siswa di pedesaan, khususnya di Kabupaten Pandeglang, mereka menghadapi tantangan berupa stabilitas jaringan digital yang belum merata, serta tidak tersedianya lembaga bimbingan belajar non-formal. Kondisi ini menempatkan sekolah sebagai tumpuan utama dan paling diandalkan bagi siswa pedesaan untuk mengakses informasi masa depan.

Di sisi lain, karakteristik sosial-budaya Kabupaten Pandeglang yang memiliki julukan Kota Santri menjadikan lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Aliyah (MA) sebagai pilihan mayoritas masyarakat setempat (BPS Kabupaten Pandeglang, 2026). Berbeda dari SMA umum, siswa MA menghadapi beban akademik ganda dari segi kurikulum karena selain mata pelajaran umum, terdapat juga rumpun mata pelajaran agama Islam yang lebih padat. Kondisi ini menuntut siswa MA memiliki regulasi diri yang baik, karena kemampuan tersebut membantu mereka dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya secara lebih terarah agar mampu menyeimbangkan dua rumpun mata pelajaran tanpa mengalami *burnout* akibat tekanan akademik, sekaligus tetap memiliki kesempatan untuk memikirkan dan mempersiapkan arah masa depannya.

Sayangnya, lembaga pendidikan di wilayah pedesaan ini juga tidak luput dari tantangan keterbatasan akses sarana dan fasilitas penunjang karier. Kondisi ini berisiko membatasi kesiapan siswa MA dalam memperoleh informasi karier yang luas. Akibatnya, siswa rentan mengalami keraguan dan kebingungan dalam merencanakan masa depan, terlebih jika tidak diimbangi oleh kapasitas psikologis yang kuat dari dalam diri mereka sendiri.

Keterkaitan antara regulasi diri dan orientasi masa depan telah banyak dibuktikan dalam beberapa penelitian terdahulu melalui beragam konteks subjek. Secara eksperimental, Howlett, Kees, dan Kemp (2008) menemukan pada mahasiswa di Amerika Serikat bahwa orientasi masa depan individu tidak akan berfungsi secara optimal dalam pengambilan keputusan jangka panjang apabila kapasitas regulasi dirinya berada dalam kondisi terkuras (*ego-depleted state*). Temuan ini mempertegas konsep dasar bahwa pembentukan gambaran masa depan yang matang membutuhkan dukungan regulasi diri yang konsisten dari dalam diri.

Di Indonesia, fenomena ini dikonfirmasi langsung pada institusi pendidikan Islam berbasis madrasah. Lauren dkk. (2020) menemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara regulasi diri dan kematangan perencanaan karier pada siswa Madrasah Aliyah di area perkotaan. Selaras dengan hal tersebut, Yuzarion dkk. (2020) dalam studinya pada siswi madrasah di Yogyakarta juga memperkuat bukti bahwa interaksi antara *self-regulated learning* dan orientasi masa depan memberikan kontribusi efektif terhadap kapasitas adaptasi dan pencapaian siswa di sekolah.

Lebih lanjut, peran regulasi diri menjadi jauh lebih dibutuhkan bagi siswa yang harus menghadapi tantangan lingkungan maupun keterbatasan finansial. Ardiansyah dan Khoir (2021) membuktikan hal ini melalui studi pada siswa dari keluarga marginal di sekolah berasrama (*boarding school*). Hasil penelitian menunjukkan, remaja dengan keterbatasan latar belakang sosial-ekonomi tetap mampu membangun orientasi masa depan karier yang matang, asalkan didukung oleh tingkat regulasi diri (*self-regulated learning*) yang tinggi.

Meskipun keterkaitan antara kedua konstruk psikologis ini telah banyak divalidasi dalam penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan baik secara konteks (*contextual gap*) maupun metodologi. Penelitian terdahulu yang menguji hubungan kedua variabel tersebut dilakukan pada subjek mahasiswa perguruan tinggi dalam penelitian eksperimen (Howlett, Kees & Kemp 2008). Sementara itu, penelitian pada tingkat sekolah menengah umumnya mengevaluasi institusi dengan lingkungan yang ideal, yaitu pada area perkotaan dengan akses informasi karier yang memadai (Lauren dkk., 2020), atau sekolah berasrama (*boarding school*) yang menerapkan pengawasan kedisiplinan ketat (Yuzarion dkk., 2020). Di samping itu, penelitian pada subjek dengan keterbatasan latar belakang sosial-ekonomi di lingkungan asrama sejauh ini masih bersifat deskriptif, sehingga belum menguji arah hubungan atau pengaruh antarvariabel secara statistik (Ardiansyah & Khoir, 2021).

Berdasarkan keterbatasan tersebut, masih terdapat celah dalam literatur empiris mengenai bagaimana regulasi diri berkontribusi terhadap pembentukan orientasi masa depan pada siswa Madrasah Aliyah di wilayah berkembang. Berbeda dengan penelitian

terdahulu yang dilakukan pada siswa di wilayah perkotaan dengan fasilitas memadai (Lauren dkk., 2020) maupun siswa *boarding school* dengan sistem pengawasan eksternal yang ketat (Yuzarion dkk., 2020), penelitian ini dilakukan pada siswa Madrasah Aliyah non-asrama di wilayah pedesaan Kabupaten Pandeglang, yang justru menghadapi kondisi sebaliknya, tanpa fasilitas perkotaan maupun sistem pengawasan eksternal yang ketat, di tengah kondisi geografis yang didominasi wilayah pedesaan serta belum meratanya sarana teknologi informasi dan infrastruktur penunjang pendidikan. Hambatan berupa minimnya instrumen asesmen terstandarisasi dan keterbatasan tenaga profesional bimbingan karier di area pedesaan menuntut pentingnya kapasitas regulasi diri, agar siswa dapat membangun orientasi masa depan sebelum lulus sekolah, sehingga mereka mampu segera mengambil langkah secara mandiri untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana regulasi diri berkontribusi dalam membentuk orientasi masa depan siswa. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai peran regulasi diri siswa di tengah keterbatasan lingkungan sekolah pedesaan. Berdasarkan seluruh uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Regulasi Diri terhadap Orientasi Masa Depan pada Siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Pandeglang".

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka lulusan sekolah menengah yang tidak melanjutkan pendidikan maupun yang menganggur, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMA/Sederajat mencapai 6,23% secara nasional dan 8,09% di Kabupaten Pandeglang.
2. Keterbatasan akses informasi karier akibat kondisi geografis pedesaan serta belum meratanya sarana teknologi informasi diduga turut mendorong pentingnya kapasitas individu, termasuk regulasi diri, dalam membantu siswa membangun orientasi masa depannya.
3. Beban akademik ganda yang dihadapi siswa Madrasah Aliyah menuntut kemampuan regulasi diri yang lebih tinggi agar siswa tetap mampu merencanakan dan mempersiapkan arah masa depannya di tengah tekanan kurikulum.
4. Penelitian yang mengkaji kontribusi regulasi diri terhadap orientasi masa depan pada siswa Madrasah Aliyah non-asrama di wilayah pedesaan masih terbatas, mengingat penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan pada konteks perkotaan atau sekolah berasrama (*boarding school*).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada pengkajian pengaruh regulasi diri terhadap orientasi masa depan pada siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Pandeglang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah terdapat pengaruh regulasi diri terhadap orientasi masa depan pada siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Pandeglang?”

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh regulasi diri terhadap orientasi masa depan pada siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Pandeglang.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya dalam ruang lingkup Psikologi Perkembangan Remaja dan Psikologi Pendidikan yang berkaitan dengan konstruk regulasi diri dan orientasi masa depan.
2. Menjadi referensi akademis tambahan dan bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji regulasi diri dan orientasi masa depan remaja di daerah berkembang.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi siswa Madrasah Aliyah mengenai regulasi diri sebagai salah satu kapasitas individu yang

dapat dilatih untuk turut membantu mempersiapkan orientasi masa depan, di samping faktor-faktor lain yang juga perlu diperhatikan.

1.6.2.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling (BK)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi guru BK dalam memahami peran regulasi diri siswa, sebagai salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam merancang program bimbingan karier di tengah keterbatasan sarana sekolah.

1.6.2.3 Bagi Institusi Madrasah Aliyah

Memberikan masukan bagi pihak pengelola Madrasah Aliyah di Kabupaten Pandeglang mengenai salah satu aspek yang berpotensi mendukung kesiapan karier dan pendidikan tinggi siswa, sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam menyusun kebijakan atau program sekolah yang lebih menyeluruh.

